

## Dinamika Pengelolaan Madrasah dalam Kesultanan Sambas, 1910-1945: Studi Kasus Madrasah Pedoman Islam

Sunandar\*

\*Program Studi Sejarah dan Perdaban Islam, Fakultas Dakwah dan Humaniora, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Jl. Raya Sejangkung No.126, Kawasan Pendidikan, Desa Sebayon, Sambas, Kalimantan Barat - Indonesia

\*Alamat korespondensi: nand2r@gmail.com  
DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v8i2.34794>

Diterima/Received: 7 Desember 2020; Direvisi/Revised: 30 April 2024; Disetujui/Accepted: 30 April 2024

### Abstract

*Madrasas, particularly Islamic religious schools, played a significant role in disseminating and practicing Islamic teachings within the Sultanate of Sambas. The image of madrasas in Sambas is embodied by two institutions established by the elite of the palace: Madrasah Sulthaniyah (1916) and Tarbiatoel Islam (1936), projecting an elite status within society. In 1936, alongside the establishment of Tarbiatoel Islam, a village madrasa named Madrasah Pedoman Islam was founded by ordinary residents outside the city of Sambas, catering to the Kampung community. However, management dynamics and ensuing issues led to the closure of these madrasas in favor of public elementary schools through the Inpres (Presidential Instruction) program. This paper employs a historical method, analyzing the periodization of Madrasah Pedoman Islam's development within its historical context. Data are sourced from manuscripts pertaining to Islamic Guidelines Madrasah. The study revealed that teachers of Madrasah Pedoman Islam, along with the community, sought solutions to the primary issue of financial constraints. One solution involved utilizing Zakat funds, including Zakat Fitrah and Zakat Māl, in the form of rice.*

**Keywords:** Sultanate Sambas; Religious Schools; Madrasah Pedoman Islam; School Management.

### Abstrak

Madrasah, khususnya sekolah agama Islam, berperan penting dalam menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam di Kesultanan Sambas. Citra madrasah di Sambas diwujudkan oleh dua lembaga yang didirikan oleh elit kesultanan, yaitu Madrasah Sulthaniyah (1916) dan Tarbiatoel Islam (1936), yang memproyeksikan status elit dalam masyarakat. Pada 1936, bersamaan dengan pendirian Tarbiatoel Islam, didirikanlah madrasah desa bernama Madrasah Pedoman Islam yang didirikan oleh warga biasa di luar kota Sambas, melayani masyarakat Kampung. Namun dinamika pengelolaan dan permasalahan yang terjadi menyebabkan penutupan madrasah tersebut dan digantikan oleh sekolah dasar negeri melalui program Inpres (Instruksi Presiden). Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis periodisasi perkembangan Madrasah Pedoman Islam dalam konteks historis yang sebagian besar data bersumber arsip pendirian madrasah. Berdasar pada studi ini diungkap bahwa guru Madrasah Pedoman Islam, bersama dengan masyarakat, mencari solusi terhadap masalah utama kendala keuangan. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan dana Zakat, termasuk Zakat Fitrah dan Zakat Māl, dalam bentuk beras.

**Kata Kunci:** Kesultanan Sambas; Sekolah Agama; Madrasah Pedoman Islam; Pengelolaan Sekolah.

### Pendahuluan

Sejarah pendidikan terutama yang bercorak Islam sejak Islam menjadi agama yang dominan di Sambas masih belum mendapat banyak perhatian. Adapun penelitian-penelitian mengenai pendidikan bercorak Islam di Sambas masih digambarkan secara samar. Perkembangan Islam di Sambas sendiri ditandai dengan perubahan politik

dari bercorak lokal (animis-dinamis) menjadi Islam. Secara spesifik, perubahan dapat dilihat dari berubahnya sebutan pemimpin (raja) dalam kosa kata lokal menjadi sultan. Selain itu juga ditandai dengan pindahnya pusat pemerintahan keraton, yang sebelumnya terletak di Kota Lama (wilayah Kecamatan Galing) ke daerah yang baru di Muare Ulakan (Sambas sekarang).

Seiring dengan perubahan politik menjadi bercorak Islam, aktifitas pendidikan di Kota Lama yang berafiliasi pada tradisi Hindu-Buddha atau lebih tepatnya tradisi agama lokal yang bersifat animisme-dinamisme juga turut berubah. Namun demikian, hal itu belum mendapatkan perhatian secara spesifik, walau beberapa peneliti telah berupaya membuka tabir tersebut. Alih-alih dapat mengungkap dinamika pendidikan tradisional di Sambas secara menyeluruh, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak hanya terfokus pada aktifitas pendidikan Islam pada awal abad ke-20 atau sedikit dimasa akhir abad ke-19. Sebagai contoh adalah tulisan Mahrus, Prasojo, & Busro (2020) yang mengupas pendidikan modern sejak 1936 hingga awal 40-an. Penelitian tersebut berfokus pada salah seorang tokoh bernama Basiuni Imran sebagai pendiri Madrasah Tarbiatoel Islam (1936). Begitu pula dengan tulisan Aslan (2019) pada jurnal *Edukasia Islamika*, yang melihat dinamika kurikulum pendidikan di Sambas dalam masa pendudukan militer Jepang (Aslan 2019). Dalam penelitiannya justru tidak memperlihatkan dengan jelas bagaimana kurikulum yang digunakan masa itu. Peneliti-peneliti tersebut memang berusaha mengungkap aspek lokal dalam sejarah pendidikan yang berlangsung di Sambas, terutama dinamika pendidikan dalam periode yang berdekatan. Namun demikian, dua karya tersebut hanya berpusat pada daerah yang sama, yaitu di kota Sambas sebagai pusat administrasi masa tradisional hingga pendudukan Jepang.

Adapun upaya mengupas perjalanan pendidikan Islam di Sambas masa Kesultanan Sambas hingga dominasi pemerintah kolonial dalam bidang sosial politik sebenarnya mulai terlihat seperti pada tulisan Suhardi, *et al.* (2020) yang melihat dinamika pendidikan tradisional di Sambas, mulai dari pendidikan di Surau hingga di rumah guru. Suhardi *et al.* (2020) juga mengupas fungsi salah satu madrasah yaitu, Madrasah Tarbiatoel Islam yang didirikan pada 1936 sebagai representasi pendidikan modern kala itu. Penelitian ini sama persis dengan peneliti sebelumnya yang ditulis oleh Erwin Mahrus dengan judul 'Falsafah dan Gerakan Pendidikan Islam, Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976)'. Dalam kajiannya masih

menggunakan kajian generalistik bahkan menyamakan dengan daerah lainnya seperti di Sumatra yang memang memiliki tradisi keilmuan melalui Dayah, Surau, Langgar dan lembaga pendidikan lain (Mahrus 2007) sehingga seolah-olah pendidikan Islam di Sambas melalui proses demikian juga. Padahal pendidikan Islam di Sambas memiliki cirinya sendiri berdasar pada *zeitgeist* (jiwa zaman) yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Secara umum memang pelaksanaan pendidikan tradisional di Nusantara dilangsungkan dengan proses demikian, akan tetapi daerah Sambas tidak memiliki tradisi pendidikan Pesantren atau padepokan seperti yang terjadi di Pulau Jawa, atau pendidikan Dayah seperti di Aceh atau daerah Sumatra yang lain. Penelitian sebelumnya sepertinya tidak menangkap bahwa ketika sebuah daerah yang tidak memiliki tradisi keilmuan yang terstruktur dalam kalangan masyarakat umum sesungguhnya diambil alih atau dirintis oleh pemerintahan Kesultanan yang bercorak Islam. Semangat keislaman memandang penting pendidikan Islam seperti yang terjadi di daerah asalnya, yakni di tanah Arab. Tradisi keilmuan yang muncul dalam dunia Arab, atau pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, diadopsi dan turut mewarnai pendidikan Islam di Nusantara, termasuk di Sambas. Pendidikan Islam yang berlangsung di Nusantara dapat dilihat dalam kasus pencapaian peradaban kerajaan-kerajaan Melayu Islam yang lebih awal seperti di Aceh dan Malaka (Al-Attas 1990). Semenjak Islam menjadi agama resmi kerajaan, diikuti perkembangan dinamika pendidikan Islam yang digerakkan oleh para guru, mubalig, mufti kerajaan, dan ulama-ulama pendakwah yang tidak berhubungan dengan politik kerajaan di tempat-tempat dakwah. Dalam konteks inilah, penelitian ini dilakukan yakni melihat seksama berdasar pada data sejarah mengenai dinamika pendidikan Islam di Sambas dengan nuansa tradisional yang berkembang dari kampung-kampung yang tidak berafiliasi pada politik lokal saat itu (Ahmad 1998; Ahok 1980).

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Setiap penelitian sejarah paling tidak melalui empat langkah, yaitu: heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. Teknik heuristik

dalam penelitian sejarah mengharuskan peneliti melakukan kegiatan pengumpulan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam menjelaskan suatu peristiwa sejarah. Di antara pengertian heuristik yaitu suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, sumber-sumber, atau evidensi sejarah (Sjamsudin 2007).

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber dalam penulisan menggunakan sumber primer berupa arsip, naskah, atau catatan pribadi yang ditulis pada saat peristiwa, yaitu mengenai catatan yang berhubungan dengan pendidikan yang berlangsung di kampung, antara lain: (1) Naskah Hasil Rapat Sekolah Pedoman Islam dan Zakat pada 1936; (2) Naskah Surat Boejang Merghani Syafi'i; (3) Menghadap Kehadapan S. P. T. Besar Borneo Minseibu Pontianak Shibu Seimukatjo di Pontianak 29 Junigatsoe 2602 (1942); (4) Naskah Surat Guntjo Sambas kepada Pengurus/Kepala Sekolah No. 2146/20-28 Junigatsu 2602 / 28 Juni 1942; (5) Naskah Surat Guntjo Sambas tentang Sekolah Partikuler, Sambas 26 Junigatsu 2602 (26 Juni 1942); (6) Naskah al-Madrasatu asās al-falāh, 1936.

Selanjutnya sumber data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi atau dikritik secara internal, kemudian melakukan interpretasi atau penafsiran (Gottschalk, 2010). Penafsiran dalam penelitian sejarah dapat dilakukan dengan cara membandingkan data untuk melihat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sama (Pranoto 2010). Abdurrahman (2007) menjelaskan bahwa interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data guna mengungkap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sama (Abdurrahman 2007).

Penulisan sejarah atau historiografi merupakan upaya untuk merekonstruksi sejarah sebagaimana diungkapkan oleh Daliman bahwa rekonstruksi sejarah akan menjadi eksis apabila hasil-hasil pendirian tersebut ditulis (Daliman 2012). Dalam hal ini penulisan sejarah perlu dilakukan yakni historiografi yang dapat dipahami sebagai cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurrahman 2007).

### **Kondisi Pendidikan di Kesultanan Sambas Awal Abad ke-20**

Sekolah atau madrasah yang berdiri di kampung di Sambas sejak awal abad ke-17 hingga awal abad ke-20 tidak banyak yang dibicarakan dalam berbagai penelitian sejarah. Hal itu disebabkan oleh data yang terbatas, di samping pengarsipan dokumen-dokumen kegiatan dalam masa-masa tersebut ditangani oleh masing-masing ahli waris dari guru yang pernah mengajar, sehingga banyak dokumen-dokumen tersebut rusak dengan sendirinya atau bahkan dibuang begitu saja. Dalam hal ini sangat diperlukan upaya-upaya penyelamatan arsip atau naskah-naskah yang bertebaran di kalangan masyarakat melalui pihak-pihak terkait terutama lembaga pemerintah.

Dalam awal abad ke-20, sebuah pendidikan atau lembaga pendidikan Islam di Sambas telah tumbuh dan menjadi lembaga pendidikan yang 'berkilau' untuk daerah ini, yakni sebuah madrasah eksklusif milik kerabat Sultan yang berada di pusat di lingkungan istana. Pendirian madrasah tidak begitu banyak dijelaskan dalam beberapa penelitian tentang sejarah pendidikan Islam di Sambas, penyebabnya adalah ketersediaan data yang tidak memadai.

Madrasah Al-Sulthaniyah didirikan pada 1916, kondisi pendidikan di Sambas kala itu justru telah didahului dengan dibangunnya sekolah milik Kolonial yang telah ada sejak 1904 (Neratja 1920), walaupun kemudian mengalami berbagai kendala.

Persoalan yang muncul di kala hadirnya sekolah milik kolonial tersebut bukan dikarenakan oleh persoalan persaingan antara kepentingan agama seperti dugaan Erwin bahwa pemerintah kolonial membuat sekolah Misi di Sambas untuk kepentingan agama mereka (Mahrus 2007). Akan tetapi, alasan yang lebih akurat adalah situasi masa Pemerintah Hindia Belanda yang telah mengenakan biaya sekolah bulanan yang menjadi beban keuangan masyarakat.

Bagi masyarakat pribumi terutama petani dengan terpaksa menghentikan mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Biayanya berkisar antara tiga hingga 50 sen per bulan untuk sekolah desa tiga tahun, naik menjadi lima hingga 125 sen untuk sekolah yang lebih tinggi, sementara dalam sekolah elit seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS) maupun sekolah Belanda lainnya dengan biaya bulanan berkisar antara dua dan 18 gulden (Ooi 2011).

Kondisi perekonomian tersebut mendorong sultan untuk kemudian mendirikan sekolah. Pada 1910 sekolah milik pemerintah kolonial yang tidak diminati karena masalah pembiayaan tersebut diubah dengan campur tangan sultan menjadi sekolah HIS (Neratja 1920). Pendirian sekolah berikutnya pada 1916 yakni pendirian Madrasah Sulthaniyah. Berarti jika dilihat bagaimana peranan pendidikan kolonial yang telah dirintis pada 1904 tersebut justru terkesan mengilhami pendirian Madrasah Sulthaniyah yang terjadi 12 tahun kemudian. Pendidikan Islam sebagaimana sekiranya dilihat dalam konteks kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, tidak didahului oleh pendidikan kolonial, melainkan pendidikan Islam yang telah menunjukkan kebesarannya dalam berbagai daerah yang telah disebutkan di atas, walau dari alumni Sulthaniyah menjadi guru dan mendirikan madrasah di beberapa kampung seperti yang terjadi di Pemangkat, Sebataan, dan Sambas (Mahrus 2007).

#### **Kemunculan Madrasah Pedoman Islam di Penakalan Tahun 1936**

Penakalan adalah nama salah satu desa/kampung yang terdapat di wilayah Kerajaan Sambas. Pada saat periode kolonial termasuk dalam wilayah administrasi *Afdeeling* Singkawang *Onderafdeeling* Sambas, begitu juga masa pendudukan Jepang mengenai pembagian wilayah administrasi. Sejak Indonesia merdeka, Penakalan merupakan wilayah Kecamatan Sambas, Kawedanan Sambas, Daerah Swatantra Tingkat II Sambas (Manuscripts 1959). Kemudian dalam 1960-an dengan penghapusan istilah Kawedanan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Desa Penakalan masuk dalam wilayah Kecamatan Sejangkung hingga sekarang.

Kampung Penakalan merupakan kampung yang sudah ada sejak masa Kolonial Belanda, bahkan dalam peta pada 1887 Kampung Penakalan telah dimasukkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam petanya (Sunandar *et al.* 2020). Keberadaan Kampung Penakalan sesungguhnya telah ada sejak lama, bahkan sangat dimungkinkan sudah ada sebelum kehadiran Kolonial Belanda di Sambas. Dengan demikian, sejarah dan dinamikanya sendiri dalam membentuk relasi dan

interaksi masyarakatnya sendiri termasuk membentuk dinamika pendidikannya.

Melihat pendidikan Islam yang berlaku dalam ruang Kesultanan Sambas, dengan 'kilauan' Madrasah Al-Sulthaniyah yang melahirkan Madrasah Tarbiatoel Islam pada 1936 dengan 'pesona'nya yang sama dengan madrasah induknya bukan satu-satunya madrasah yang memberikan peran dalam kemajuan Islam di Samba. Terdapat madrasah yang justru lahir sendiri sebagai wujud kebutuhan masyarakatnya terhadap pendidikan Islam. Lembaga tersebut didirikan oleh para Haji yang sekaligus telah menuntut ilmu agama selama mereka berada di Mekkah. Salah satunya adalah Madrasah Pedoman Islam di Desa Penakalan didirikan pada 2 Maret 1936 (Manuscripts 1942b) sebelum pendirian Tarbiatoel Islam oleh Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran dan kawan-kawannya pada 5 Juli 1936. Madrasah Pedoman Islam didirikan oleh Syapawi bin Usman berasal dari Segerunding Sambas dan Boejang Merghani bin Rafa'i yang berasal dari Kampung Manggis Sambas (Nurdi 1980).

Kemunculan Madrasah Pedoman Islam di Penakalan sulit dideskripsikan mengenai proses-proses baik mengenai profil lokasi, guru, dan latar keilmuannya. Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa madrasah tersebut kini berlokasi di rumah warga. Sebelum mempunyai bangunan sendiri, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan berpindah-pindah. Selain itu, kegiatan belajar mengajar juga bisa dilaksanakan di rumah guru seperti yang dilakukan oleh M. Nurdi yang menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar agama terutama menulis dan membaca huruf Arab dan Latin. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama delapan bulan dengan jumlah murid sebanyak 16 orang (Nurdi 1980).

Kegiatan mengajar agama dilakukan oleh M. Nurdi itu sebenarnya merupakan kegiatan belajar di luar Madrasah Pedoman Islam, khususnya bagi anak-anak pra-sekolah, seperti kegiatan mengaji Al-Quran. Ia sendiri adalah alumni Pedoman Islam yang masuk pada 1936 dan selesai pada 1940. Akan tetapi, setelah belajar di Madrasah Pedoman Islam, ia secara khusus belajar kepada Ustad Abdullah bin H. Ali di Kampung Manggis selama dua tahun, dan kemudian menjadi guru di Madrasah Pedoman

Islam pada 1950 bersama dengan M. Bahdi H. Mohtar (Wawancara dengan Azdi, 2019).

Pendirian madrasah Pedoman Islam dimulai dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Syapawi bin Usman dan Boejang Marghani bin Rafai. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Boejang Marghani adalah murid Imam Djabir, kemudian menetap di Penakalan dan mendirikan Madrasah (Wawancara dengan Su Pah 2019). Mengenai pendirian madrasah tersebut dijelaskan secara singkat oleh Boejang Marghani dalam surat yang ditujukan kepada pemerintah Jepang di Pontianak. Disebutkan bahwa sekolah tersebut didirikan pada 2 Maret 1936 (*Manuscripts 1942b*).

**Tabel 1 Periode Perkembangan Madrasah Pedoman Islam Penakalan**

No	Tahun	Corak Pendidikan	Keterangan
1.	1936-1939	Masa Pembentukan	Tempat belajar berpindah-pindah
2.	1940-1942	Mandiri	Mulai mengarang kitab-kitab bahan pelajaran
3.	1942-1944	Pengawasan Jepang	Harus mendapat izin mengajar dari Jepang
4.	1945-1949	Dibawah Pengawasan NICA /Demang	Izin mengajar dikeluarkan oleh Demang
5.	1950-1958	Masa krisis Ekonomi	Munculnya Krisis Ekonomi Dan Semukel
6.	1958-1964	Madrasah Ibtidaiyah	Di bawah Pengawasan Jawatan Pendidikan Agama Kab. Sambas
7.	1965-1972	SD Negeri Kampung Lorong	Di bawah Pengawasan Departemen P dan K Wilayah Sambas
8.	1973-Sekarang	SDN Negeri Penakalan	Pemerintah Kabupaten Sambas

Madrasah Pedoman Islam telah eksis sejak 1936 hingga 1965. Madrasah ini berakhir ketika Sekolah Dasar Negeri dibangun di Kampung Lorong Sambas, sehingga murid-murid Madrasah Pedoman Islam di Penakalan terpaksa melanjutkan studi ke luar. Pada 1973 berdasar pada program Pemerintah Orde Baru telah muncul kebijakan Sekolah Instruksi Presiden (Inpres) dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I. Program ini berfungsi untuk memajukan pendidikan bagi masyarakat Indonesia secara merata. Sejak saat itu, di Penakalan pun dibangun sebuah sekolah Inpres

yang masih bertahan hingga sekarang. Perkembangan sekolah di Penakalan tampak pada Tabel 1.

### Pemberlakuan Peraturan

Sejak 1936, Madrasah Pedoman Islam telah dibentuk dan beroperasi dalam menjalankan pembelajaran bagi masyarakat desa. Kehadiran sekolah tersebut menjadi salah satu jawaban terhadap kebutuhan pendidikan bagiarganya, terutama dalam pemenuhan pengetahuan Islam. Guru Pawi atau Syafawi bin Usman, Boejang Merghani bin Rafa'i, dan Boejang Amat b. H. Jahja adalah tokoh yang membidani pendirian madrasah tersebut.

Administrasi pendirian madrasah ini diawali dengan pembentukan sebuah komite yang disebut *Bestuur Committee* Sekolah, yang diketuai oleh Syafawi bin Usman dari Kampung Segerunding. Tugas komite sekolah adalah membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah, mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul, dan menyediakan kitab-kitab yang akan digunakan sebagai materi dalam proses pendidikan dan pengajaran.

Untuk peraturan sekolah, dirumuskan peraturan yang diberi nama al-Madrasatu asās al-falāh/asasul falah school. Naskah peraturan ini ditulis dalam dua teks, yakni Jawi dan Latin, dengan terdiri dari lima pasal. Pada bagian awal dituliskan tiga jenis aturan, yaitu tentang (a) penerimaan murid; (b) pembelajaran di sekolah; (c) kelulusan murid. Sebagai contoh pada Bahagian I, Pasal 1, disebutkan bahwa penerimaan murid dilakukan pada Juli pada kalender Masehi, atau pada Syawal kalender Hijriyah, atau pada beberapa waktu yang masih dekat kepada ke dua tanggal tersebut (*Manuscripts 1936*).

Manajemen sekolah/madrasah secara modern tampak telah tergambar sebagai program pendidikan bagi Kesultanan Sambas, ketika Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran dan rekan-rekannya mendirikan Madrasah Tarbiatoel Islam (Sunandar 2012; Sunandar). Madrasah ini dianggap sebagai madrasah modern pertama di Sambas karena menggunakan kelas dalam pembelajaran dan memiliki peraturan yang mengatur arah pendidikan yang dimuat dalam

Statuten en Huishoudelijk Reglement atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Manuscripts 1936). Di wilayah kota atau madrasah kota, situasi itu wajar terjadi, lagipula didukung oleh tenaga-tenaga profesional dalam bidangnya.

Bagi Madrasah Pedoman Islam yang terletak jauh dari pusat kota, mereka juga melakukan hal serupa dalam manajemen sekolah, yaitu menyiapkan administrasi sekolah sebagai aspek normatif yang harus ada. Tiga tahun setelah pendiriannya, tepatnya pada 1939, madrasah ini mengalami masalah besar yang berimbas pada kelangsungan pendidikan. Para pengurus menghadapi dua persoalan utama, yakni kepercayaan masyarakat terhadap guru yang di datangkan serta masalah biaya operasional sekolah.

Langkah yang diambil pengurus adalah dengan mengundang para wali siswa sebanyak 11 orang dalam sebuah pertemuan, ditambah dengan menghadirkan para tokoh dan masyarakat berjumlah 38 orang. Pertemuan yang digagas oleh Boejang Mergani itu merumuskan tiga masalah pokok, yaitu: kelangsungan sekolah, keberadaan dua orang guru lain (Guru Pawi dan Guru Boejang Amat), dan upaya-upaya mencari dana dalam pengelolaan madrasah (Manuscripts 1939).

Rapat antara pengelola madrasah dan masyarakat semakin memanas, terutama ketika dibahas mengenai kelangsungan pendidikan bagi anak-anak di Penakalan. Kemungkinan terburuk pada saat itu adalah sekolah ditutup dan secara otomatis tidak ada lagi pendidikan bagi murid-murid.

Puncak perdebatan yang terjadi akhirnya diputuskan dalam voting pengambilan suara. Dua dari tiga masalah yang alot dan dibuatkan dalam surat suara. Perdebatan itu meliputi: (a) keputusan untuk menyekolahkan anak; dan (b) pengakuan guru bantu (Manuscripts 1939).

Dari 49 orang yang hadir, 23 orang memberikan suara abstain pada persoalan pertama, 4 orang menjawab tidak, dan sisanya, sebanyak 22 orang, tetap menginginkan anak-anak mereka bersekolah di Madrasah Pedoman Islam Penakalan. Begitu pula pada persoalan keberadaan dua orang guru (Guru Pawi dan Guru Boejang Amat), 20 orang memberikan suara abstain terhadap persoalan itu.

Jika dilihat dari persoalan yang diangkat tersebut, sejak Madrasah ini didirikan pada 2 Maret 1936, telah mengalami tantangan berat. Masalah tersebut terletak pada persoalan finansial operasional sekolah. Madrasah belum didukung oleh sarana yang memadai, seperti bangunan sekolah dan pembiayaan operasionalnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh peneliti, bahwa persoalan mendasar dalam pelaksanaan pendidikan di Sambas, seperti yang dialami oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1904 yang mendirikan sekolah, masalah utamanya terletak pada pembiayaan yang sangat mahal bagi para petani.

Masalah pembiayaan pendidikan, sebenarnya tidak hanya dialami oleh pengelola sekolah baik yang berada di pusat kota Sambas (sekolah Misi) atau sekolah partikuler seperti di Penakalan, masalah ini menjadi persoalan yang berlaku secara menyeluruh di wilayah Borneo Barat. Dalam proses voting tersebut, terdapat di antara peserta rapat yang langsung memberikan dana wakaf untuk keperluan sekolah sebesar 5,50 sen yang diberikan oleh Haji Hamid (Manuscripts 1939).

Pembiayaan sekolah atau madrasah swasta di Sambas sejak awal telah ditanggapi dengan serius oleh para pengelola, seperti yang diperlihatkan oleh Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran dalam upaya membangun pendidikan, terutama Madrasah. Salah satu kebijakannya adalah dengan memanfaatkan dana yang berasal dari Zakat, terutama Zakat Maal. Informasi tersebut dapat disimak dalam surat yang diberikan oleh Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (Sunandar 2017).

Pemanfaatan dana yang bersumber dari Zakat Maal di Sambas sebagai penopang kegiatan keagamaan telah lama dilaksanakan dan ditetapkan oleh kerajaan melalui Maharaja Imam, menjadi model dalam pembiayaan pendidikan tradisional di Sambas. Proses penyerahannya biasanya langsung diserahkan kepada amil sekolah, atau melalui Lebai-lebai kampung, kemudian diserahkan ke Maharaja Imam yang berada di kota Sambas, baru kemudian dana tersebut didistribusikan. Pengelolaan dana tersebut masih sangat sederhana, mengenai kapan waktu pertama pengelolaan, model, serta ke sekolah/madrasah mana saja sulit

ditemukan. Kemungkinan besar hanya berlangsung di seputar pusat kota Sambas saja, sementara bagi sekolah/madrasah yang terdapat di daerah/desa dikelola sendiri oleh para pengurus sekolah beserta Lebai Kampung.

Pada 1944, pengelolaan dana yang bersumber dari umat berupa Zakat baru direncanakan dengan membentuk Badan Amil Zakat. Pembentukan lembaga tersebut dihadiri oleh perwakilan Ulama dari seluruh daerah Sambas, seperti Bengkayang, Singkawang, Pemangkat, Tebas, Jawai, dan Teluk Keramat, yang menghasilkan draf rumusan undang-undang sebanyak 37 pasal mengenai persoalan biaya nikah, cerai, rujuk, zakat (Zakat Maal dan Zakat Fitrah), tata cara penarikan, distribusi/pembagian dana, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Walau perumusan peraturan itu baru terjadi tahun 1944, praktek pengelolaan dana yang bersumber dari umat sudah berlangsung lama dan bersifat permanen di tengah masyarakat Sambas.

Hal serupa terjadi di Penakalan. Walaupun rapat mengenai pengelolaan keuangan madrasah baru dilakukan pada 1939 (tiga tahun setelah pendirian madrasah), para guru Madrasah Pedoman Islam, terutama Boedjang Merghani, sudah menerima zakat terutama zakat fitrah sejak tahun 1937 (Manuscripts, 1937). Pasca rapat Madrasah Pedoman Islam tahun 1939, jumlah penerimaan zakat yang berhasil diterima oleh Boejang Margani mengalami peningkatan, yang diperuntukkan untuk keberlanjutan Madrasah Pedoman Islam dalam menghadapi persoalan keuangan. Sumber keuangan sejak tahun 1939 telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dari zakat maal. Upaya yang dilakukan oleh pengurus sekolah dalam mempertahankan sekolah/madrasah di Penakalan menemukan jalan keluar dari persoalan pembiayaan.

### **Pendudukan Jepang dan Pengaruhnya Bagi Madrasah Pedoman Islam**

Sejak masa pendudukan Jepang di Sambas tahun 1942, kebijakan pendidikan mengalami perubahan karena kepentingan politik Jepang. Seluruh sekolah harus mendapatkan izin dari Pemerintah Jepang, termasuk sekolah-sekolah yang berada di

kampung-kampung. Surat tersebut dikirim melalui Guntjo Sambas dengan isi sebagai berikut.

“Bersama ini dikirim kepada toean salinan soerat edaran tentang sekolah Agama dan sekolah partikelir, dengan permintaan soepaja toean dengan selekas moengkin memasoekkan permohonan ke hadapan S.P.T. Besar Borneo Minseibu Pontianak Shibu Seimukatjo menoeroet boenji soerat edaran terseboet dan permohonan dari toean itoe dikirimkan dengan perantaraan saja (Manuscripts 1942a).”

Istilah "Guntjo" merupakan sebutan bagi pemimpin tingkat kawedanan atau Distrik dalam masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Asisten Residen. Semua urusan dalam wilayah Sambas ditangani oleh seorang Guntjo. Isi surat yang disampaikan oleh Guntjo Sambas adalah meneruskan surat yang dikeluarkan oleh Minseibu Pontianak Shibu Seimukatjo, yaitu sebuah departemen di Pontianak yang mengurus persoalan agama. Surat itu antara lain berisi izin pembukaan sekolah-sekolah agama dalam daerah Borneo Barat, baik agama Islam maupun agama Kristen (Protestan dan Katolik), begitu juga sekolah-sekolah partikelir, tetapi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada pemerintah dengan melengkapi berkas. Berkas tersebut berisikan informasi mengenai (a). Daftar semua materi buku yang digunakan atau akan digunakan di sekolah-sekolah tersebut; (b) Nama-nama semua guru di setiap sekolah; (c) Jumlah murid di setiap kelas, terbagi atas laki-laki dan perempuan; (d) Daftar pengajaran yang digunakan di sekolah-sekolah tersebut (*Manuscripts 1942a*).

Sebagaimana yang terdapat dalam poin pertama surat tersebut, Shibu-Seimukatjo secara khusus menangani persoalan agama dan pendidikan agama, termasuk sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh masyarakat. Sekolah atau Madrasah, terutama yang didirikan oleh pihak swasta, ketika masa pendudukan Jepang harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Ini mencakup guru, pelajaran, dan buku yang digunakan dalam pembelajaran yang harus dilaporkan. Hal ini berbeda dengan masa pemerintahan Kolonial Belanda. Walaupun mereka beberapa kali mengeluarkan Ordonansi Guru tahun 1923 yang bersifat perentif, kebijakan

tersebut dirancang untuk menekan pertumbuhan sekolah atau Madrasah agama yang dikhawatirkan mengganggu stabilitas kekuasaan kolonial.

Pendidikan bagi masyarakat Pribumi dalam dua kekuasaan, baik Belanda maupun Jepang, memiliki perbedaan yang kontras. Pemerintahan Hindia Belanda mengklasifikasikan pendidikan dalam dua kategori utama: sekolah khusus untuk rakyat pribumi (*Inheemsch Lager Onderwijs*) dan sekolah khusus untuk Barat (*westersch lager onderwijs*). Sekolah pemerintah Belanda tersebut terdiri dari Sekolah Kelas I atau Sekolah Rendah yang terdiri dari HIS, *Europeesche Lagere School* (ELS), dan *Hollandsch Chineesche School* (HCS), serta Sekolah Kelas II bagi rakyat jelata.

Sistem pendidikan ini diubah oleh pemerintah Jepang ketika berkuasa di Indonesia, termasuk di Sambas. Konsep pendidikan *westersch lager onderwijs* dirubah total dan semua sekolah desa ditunjuk sebagai sekolah utama dengan diresapi kurikulum gaya Jepang. Kemudian, pada bulan April 1943, semua Sekolah Desa ini dipindahkan statusnya menjadi Sekolah Negeri. Perubahan sistem pendidikan ini yang pada awalnya lebih mementingkan golongan elit dan bangsa Eropa menjadi terbuka kepada seluruh penduduk pribumi, pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan untuk menopang keberhasilan Jepang dalam menjalankan misinya untuk mendirikan wilayah persemakmuran Asia Raya dan menghadapi Perang Pasifik.

Jadi, setiap pengurus sekolah atau madrasah wajib melaporkan sekolahnya dan meminta izin untuk menyelenggarakan pendidikan. Surat izin seperti ini menjadi keharusan yang harus segera dikirim oleh para guru madrasah atau sekolah partikuler selama masa pendudukan Jepang di wilayah Kalimantan Barat, seperti yang ditulis oleh Steenbrink (2007) mengenai aktivitas keagamaan dan sekolah yang terdapat di wilayah tersebut dalam catatannya. Dalam catatan harian yang ditulis oleh seorang Guru pada Sekolah Misi Katolik sekaligus sebagai Pastor pada salah satu Gereja di Sekadau bernama Petrus Denggol bin Sali, ia mengisahkan perlakuan yang diterimanya oleh Demang Sekadau dan perlakuan pemerintah Jepang melalui Shibu Seimukatjo. Ia bahkan disuruh mengambil perlengkapan keagamaannya

untuk diserahkan kepada pihak Keibethey (pengganti Shibu Seimukatjo).

Apa yang dialami oleh Guru sekolah Misi seperti Petrus Denggol tidak seperti yang dialami oleh Boejang Amat di Penakalan. Petrus Denggol nampaknya tidak mendapatkan surat izin dari pemerintah Jepang untuk melanjutkan pendidikan seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pada 1948, tiga tahun setelah pemerintah Jepang meninggalkan Sambas, pengaturan administrasi sekolah atau madrasah kembali dibawah kekuasaan Belanda sejak 1945. Surat izin mengajar pada Madrasah Pedoman Islam dikeluarkan oleh Demang Sambas, yaitu U. Karnain, pada 17 September 1948 dengan Nomor 1154/18 untuk Boejang Amat bin H. Jahja.

Sejak pendirian Madrasah Pedoman Islam Penakalan hingga 1948, sekolah ini hanya memiliki tiga orang guru yaitu Syapawi bin Usman, Boejang Merghani bin Rafai dan Boejang Amat b. H. Jahja. Secara spesifik dapat dianalisis mengenai daftar guru dan murid (Tabel 2) dan daftar pelajaran pada Madrasah Pedoman Islam Penakalan (Tabel 3).

**Tabel 2 Daftar Guru Pedoman Islam Penakalan**

Nama	Asal	Jabatan	Mulai Mengajar
Syafawi B. Usman	Kp. Segerunding Sambas	Kepala Sekolah 1936-1941	1936
Boejang Merghani b. Rafa'i	Kp. Manggis, Sambas	Kepala Sekolah (1942-1947)	1936
Boejang Amat b. H. Jahja	Penakalan	Kepala Sekolah (1948)	1954-1947
M. Nurdi	Penakalan		1950

Sumber: Manuscripts 1948.

**Tabel 3 Daftar Mata Pelajaran Madrasah Pedoman Islam, 1936-1942**

No	Kelas	Jumlah Mata Pelajaran
1	Kelas 1	4
2	Kelas 2	8
3	Kelas 3	9
4	Kelas 4	9
5	Kelas 5	8

Sumber: Manuscripts 1941.



Tabel 3 menunjukkan mata pelajaran yang diajarkan dalam Madrasah Pedoman Islam di Penakalan sejak tahun berdiri (1936) hingga 1942. Madrasah ini menggunakan buku-buku pelajaran yang umumnya berasal dari penerbitan yang mapan seperti Muhammadiyah Yogyakarta dan Penerbit Saiful Medan, serta buku-buku pelajaran agama Islam yang dikarang sendiri oleh para guru madrasah. Madrasah Pedoman Islam Penakalan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyediakan sumber daya pendidikan yang berkualitas bagi para muridnya.

Penggunaan buku cetak yang berasal dari berbagai daerah menunjukkan bahwa Madrasah Pedoman Islam Penakalan memiliki akses yang luas terhadap literatur pendidikan pada masa itu, yang membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, pengarang buku-buku pelajaran agama Islam oleh para guru madrasah sendiri menunjukkan kemandirian mereka dalam menyusun kurikulum dan materi pelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa.

Pembentukan Madrasah Pedoman Islam Penakalan sebagai institusi pendidikan modern pada masanya juga tercermin dalam manajemen pendidikannya. Penggunaan kelas dan tingkatan dalam proses pembelajaran adalah ciri khas pendidikan modern yang berbeda dengan pendidikan tradisional yang umumnya dilaksanakan di rumah atau surau atau masjid dengan menggunakan *halaqah-halaqah*. Ini menunjukkan bahwa Madrasah Pedoman Islam Penakalan telah memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang modern untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

## Simpulan

Madrasah Pedoman Islam merupakan hasil inisiatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di kalangan bawah tanpa melibatkan pemerintah lokal atau kerajaan. Berbeda dengan Madrasah Sulthaniyah dan Tarbiatoel Islam yang melibatkan unsur pemerintah lokal dalam pembentukannya, Madrasah Pedoman Islam muncul sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan bagi masyarakat kalangan bawah yang

tidak tercakup oleh pendidikan formal yang ada saat itu.

Dalam perjalanannya, Madrasah Pedoman Islam melewati berbagai tahapan pembentukan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Namun, pada akhirnya, madrasah ini terpaksa ditutup karena munculnya kebijakan pendirian Sekolah Dasar Negeri melalui Instruksi Presiden atau kemunculan sekolah inpres.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Madrasah Pedoman Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, namun dinamika perubahan kebijakan dan perkembangan sistem pendidikan formal membuatnya harus menutup pintu pada akhirnya.

## Referensi

- Abdurrahman, D. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Ar-Ruzz Media.
- Ahmad, D., M. Z. 1998. *Perkembangan Kabupaten Sambas dan Sejarahnya*.
- Ahok, P. 1980. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Barat, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Kalimantan Barat*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud.
- Al-Attas, S. M. N. 1990. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu* (Cetakan 4). Mizan.
- Aslan, H. 2019. "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang di Sambas, Indonesia." *Edukasia Islamika*, 2(2): 171. <https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2295>
- Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Ombak.
- Gottschalk, L. 2010. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah* (N. Susanto, ed.). Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Mahrus, E. 2007. *Falsafah dan Gerakan Pendidikan Islam, Maharaja Imam Sambas Muhammad Basiuni Imran (1885-1976)*. STAIN Pontianak Press.
- Mahrus, E., Prasojo, Z. H., & Busro, B. 2020. "Messages of Religious Moderation Education in Sambas Islamic Manuscripts." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 24, no 1.

- <https://doi.org/10.29300/madania.v24i1.3283>
- Manuscripts. 1936. *al-Madrasatu Asās al-Falāh*.
- Manuscripts. 1937. *Penerimaan Zakat Boejang Merghani tahun 1356-1359 / 1937-1940*.
- Manuscripts. 1939. *Rapat Rekolah dan Zakat*.
- Manuscripts. 1941. *Daftar Pelajaran Madrasah Pedoman Islam Penakalan Tahun 1941 Naskah Leer Plan Oentoek P.I School*.
- Manuscripts. 1942a. *Naskah Surat Guntjo Sambas kepada Pengoeroes/Kepala Sekolah, No. 2146/20- 28 Junigatsu 2602 / 28 Juni 1942*.
- Manuscripts. 1942b. *Surat Boejang Merghani Syafi'i: Menghadap Kehadapan S. P. T. Besar Borneo Minseibu Pontianak Shibu Seimukatjo di Pontianak*.
- Manuscripts. 1948a. *Keadaan Goeroe Boelan Augustus 1948*.
- Manuscripts. 1959. *KTP H. Ismail H. A. Rachman*.
- Merghani, B. 1942. *Menghadap Kehadapan S. P. T. Besar Borneo Minseibu Pontianak Shibu Seimukatjo di Pontianak*.
- Neratja. 1920. "Overzicht van de Inlandsche Maleisch-Chineesche." *Maleische Java Bladen, Neratja*, 1.
- Nurdi, M. 1980. *Riwayat M. Nurdi*.
- Ooi, K. G. 2011. *The Japanese occupation of Borneo, 1941-45*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203850541>
- Pranoto, S. W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu.
- Sjamsudin, H. 2007. *Metodologi Sejarah* (Revisi). Ombak.
- Steenbrink, K. 2007. *Catholics in Indonesia, 1808-1942: A Documented History, Volume 2: The Spectacular Growth of a Self Confident Minority, 1903-1942*. KITLV Press.
- Suhardi, M., Mulyono, S., Aslan, A., Syakhrani, H. A. W., & Putra, P. 2020. "Perubahan kurikulum lembaga pendidikan Islam di Sambas pada masa Kesultanan Sambas." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2715>
- Sunandar, Nur Syamsiah, Radimin, Pitria, Gunawan. 2020. *Sejarah Desa Penakalan: Asal Usul, Perkembangan Sosial, Ekonomi, dan Budaya*. Pontianak: CV Derwati.
- Sunandar. 2012. *Peran Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Kerajaan Alwatzikhobillah Sambas 1913-1976*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Sunandar. 2017. "Sejarah Pengelolaan Baitul Mal di Sambas: Studi Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam di Masa Muhammad Basiuni Imran." *Falsafah* III, no. 1: 101–112.
- Sunandar. 2019. "Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) Di Sambas." *Medina-Te*, 15: 142–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3542>